

PENDEKATAN GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM REDD+ DI KABUPATEN BERAU

Rafi Ardani¹, Ismar Hamid¹

¹Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Corresponding author:

Rafi Ardani

rafiardanio14@gmail.com

Keywords:

REDD+; environmental movement;
local communities

DOI:

<https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.376>

Article History:

Received: June 5, 2024

Accepted: February 27, 2025

ABSTRACT

The REDD+ programme aims to curb deforestation, with Berau Regency as one of the target areas with a commitment to implement the programme until 2030. The purpose of this research is to examine the environmental movement approach applied to the REDD+ programme and its impact on the sustainability of local livelihoods in Berau Regency. This research focuses on the REDD+ programme implemented by non-government organisations (NGOs), namely YKAN, PERISAI, Forclime, and SRP Payo-Payo. This research uses a qualitative method with a case study research approach. Data collection techniques used candid observation, semi-structured interviews and documentation. Data was analysed using an interactive model. The results show that the approach applied to the implementation of REDD+ programmes by non-government organisations (NGOs) in Berau Regency is a participatory approach, where the community acts as the main actor in every programme implementation. This approach is supported by the paradigm of the eco-populism environmental movement, which pays attention to aspects of local knowledge and the sources of life of local communities. The presence of the REDD+ programme does not disrupt livelihoods and does not change the culture of local communities, or integrate the objectives of the REDD+ programme with aspects that already exist in the community. The implication is that with the REDD+ programme, the community gets additional sources of livelihood without reducing the existing sources of livelihood that have been carried out for generations. Furthermore, the REDD+ programme is able to stimulate the community to abandon unsustainable practices. The REDD+ programme in Berau Regency should continue to be implemented by making local communities the main actors and adhering to local wisdom that exists in the community.

ABSTRAK

Program REDD+ hadir untuk menghambat laju deforestasi, yang salah satu wilayah sasarannya adalah Kabupaten Berau dengan komitmen pelaksanaan sampai tahun 2030. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan gerakan lingkungan hidup yang diterapkan pada program REDD+ dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Berau. Penelitian ini memfokuskan pada program REDD+ yang dilaksanakan oleh non-government organization (NGO), yakni YKAN, PERISAI, Forclime, dan SRP Payo-Payo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi terus terang, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan pada pelaksanaan program REDD+ oleh non-government organization (NGO) di Kabupaten Berau adalah pendekatan partisipatif, yakni masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam setiap pelaksanaan program. Pendekatan tersebut ditopang paradigma gerakan lingkungan hidup eko-populisme, yang memperhatikan aspek-aspek pengetahuan lokal serta sumber-sumber kehidupan masyarakat lokal. Hadirnya program REDD+ tidak mengganggu *livelihood* dan tidak mengubah budaya masyarakat lokal, atau mengintegrasikan tujuan program REDD+ dengan aspek-aspek yang sudah ada di masyarakat. Implikasinya, dengan adanya program REDD+ masyarakat mendapatkan sumber kehidupan tambahan tanpa mengurangi sumber kehidupan yang sudah ada dan dijalankan secara turun temurun. Lebih jauh, program REDD+ mampu menstimulus masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Program REDD+ di Kabupaten Berau sebaiknya terus dilaksanakan dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dan berpegang pada kearifan lokal yang ada pada masyarakat.

How to Cite:

Ardani, R., & Hamid, I. (2025). Pendekatan Gerakan Lingkungan Hidup yang Diterapkan pada Program REDD+ di Kabupaten Berau. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4(1), 71-83. <https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.376>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya laju deforestasi yang terjadi di Indonesia menarik perhatian dunia. Pada pertemuan COP (Conference of the Parties) ke 13 yang dilaksanakan di Bali pada 4 Desember 2007, skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) diusulkan yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dengan cara menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dengan memberikan kompensasi secara finansial dan memberikan insentif keuangan kepada pihak yang berhasil meredam laju emisi karbon (KLHK, 2019).

REDD+ merupakan inisiatif global dengan desain pemberian insentif kepada negara berkembang untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca, proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan, suara dari masyarakat penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin (Bayrak & Marafa, 2016). REDD+ juga mencantumkan peran dan konservasi, manajemen hutan berkepanjangan, serta peningkatan stok hutan karbon (Wahyuni, 2019).

Implementasi REDD+ pertama di Indonesia dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan. Salah satu alasan penetapan Provinsi Kalimantan Tengah adalah kelembagaan masyarakat hukum adatnya yang masih eksis dan mempunyai peran penting di masyarakat. Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Berbagai pelatihan diadakan untuk mendukung program REDD+ yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, mulai dari pemberian pemahaman tentang REDD+, persoalan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan sistem ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan (Wicaksono & Yurista, 2013).

Penelitian (Ningsih, 2019), menyatakan bahwa program REDD+ di Indonesia telah berjalan dengan baik. Namun beberapa penelitian lain mengemukakan bahwa berbagai permasalahan muncul pada program REDD+ di beberapa provinsi dan menyebabkan kegagalan. Penelitian (Firnaherera, 2013), mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan dan gambut di area REDD+ kurang efektif dibandingkan dengan Masyarakat Lokal. Penelitian (Kholida, 2016), mengemukakan bahwa dampak sosial dari kegiatan program REDD+ belum signifikan. Penelitian (Ferry, 2013), mengemukakan bahwa masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Tengah tersingkir akibat masuknya program REDD+. Sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat dianggap salah oleh pemerintah, sehingga masyarakat adat tidak mempunyai hak atas hutan. Penelitian (Febriyanti, 2017), mengemukakan pelaksanaan program REDD+ di Hutan Ranti menimbulkan konflik. Masyarakat adat Talang Mamak melakukan perlawanan terhadap Program Restorasi Ekosistem PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT).

Kondisi yang berbeda terjadi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. (Hamid & Susilowati, 2020), mengemukakan bahwa NGO Payo-payo bersama masyarakat di

Kampung Long Ayap Kabupaten Berau melalui program REDD+ berhasil mengembangkan kegiatan ekonomi agroforestri kopi di atas hutan seluas 155 Ha. Kegiatan penanaman dilakukan secara kolektif, yang dimotori oleh perempuan. Lahan kopi tersebut menjadi aset ekonomi masyarakat, yang dikuasai secara kolektif yang diatur oleh pemerintah kampung. Dengan demikian, 155 Ha hutan pada APL Kampung Long Ayap telah terselamatkan dari ancaman degradasi hutan dengan tidak menghilangkan akses masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan lingkungan hidup yang diterapkan pada program REDD+ dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Berau. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan paradigma gerakan lingkungan hidup eko-populisme, yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan karena di dalamnya terdapat penghidupan masyarakat lokal (*livelihood*). ([Petras & Veltmeyer, 2007](#); [Asrawawija, 2020](#)), memaparkan gerakan eko-populisme berkembang di Argentina, Brazil, Bolivia, dan Ekuador yang dipengaruhi gerakan Zapatista. Menurut ([Marti, 2015](#); [Asrawawija, 2020](#)), ada tiga faktor yang membentuk gerakan lingkungan hidup eko-populisme, yaitu faktor lingkungan, ekonomi, dan hukum. ([Weitmer & Birner, 2005](#); [Safitri & Hamid, 2023](#)), mengemukakan gerakan lingkungan hidup eko-populisme memiliki cara pandang holistik bahwa manusia, flora-fauna dan lingkungannya adalah satu kesatuan ekosistem. ([Hamid & Meilinda, 2023](#)), menyatakan paradigma eko-populisme sangat membela hak-hak masyarakat yang sumber kehidupannya berasal dari alam sebab masyarakat lokal dan adat adalah penanggung resiko terbesar yang perlu dilindungi. Menurut ([Hamid & Amalia, 2024](#)), eko-populisme menekankan pada hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekosistem melalui pertukaran energi, materi dan informasi dapat berjalan dengan baik dan teratur karena adanya arus *input* dan *output* yang seimbang.

Penelitian ini memberikan jawaban tentang pendekatan yang seharusnya digunakan agar pelaksanaan program REDD+ dapat mewujudkan prinsip adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini merupakan referensi yang penting untuk direplikasi di berbagai tempat pelaksanaan program REDD+.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini melakukan mengeksplorasi secara mendalam terhadap pendekatan gerakan lingkungan hidup yang diterapkan pada program REDD+ dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Berau. Penelitian ini dilakukan di dua desa (kampung) yang menjadi lokasi pelaksanaan program REDD+ di Kabupaten Berau, yakni: (1) Kampung Teluk Semanting Kecamatan Derawan; dan, (2) Kampung Long Ayap Kecamatan Segah. Data penelitian terdiri dari: (1) data primer, yakni data situasi sosial di lokasi penelitian, yang mencakup orang, aktivitas, lingkungan fisik, dan data-data hasil wawancara; (2) data sekunder, yakni berbagai literatur dalam bentuk dokumen program, laporan program, buku, berita, jurnal, dan profil desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara partisipatif, yakni peneliti terlibat langsung pada berbagai kegiatan masyarakat, seperti berladang, berburu, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan implemetasi program REDD+ di lokasi

penelitian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap 18 orang informan informan, yang terdiri dari masyarakat lokal di dua desa (kampung), pemerintah desa (kampung), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, dan perwakilan NGO pelaksana program REDD+ di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model interaktif ([Miles et al., 2014](#); [Sugiyono, 2022](#)), yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing*, yang berlangsung secara interaktif. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Oktober sampai Desember 2023.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah REDD+ di Kabupaten Berau

Berawal dari hadirnya beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Berau ke *Conference of Parties* (COP) ke-13 tahun 2007 di Bali. Pertemuan ini membahas serta memberikan solusi terhadap deforestasi di negara berkembang, seperti Indonesia. Mengurangi deforestasi, namun tetap dapat melanjutkan pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Berau menyadari pentingnya perannya pada upaya implementasi REDD+ dengan tujuan utamanya melindungi dan mempertahankan kawasan hutan yang masih ada, sekaligus meningkatkan pembangunan daerah. Skema REDD+ juga menawarkan peluang insentif bagi daerah yang memiliki komitmen kuat untuk menyelaraskan pembangunan dan perlindungan kawasan hutan. Kabupaten Berau disini bekerjasama dengan YKAN untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengumpulan data, diskusi, penelitian, penguatan kapasitas, serta kelembagaan dalam rangka mempersiapkan Berau sebagai salah satu yang dapat menerapkan program REDD+.

Kelompok kerja REDD+ terdiri dari perwakilan unsur organisasi perangkat daerah, unsur akademisi, unsur perusahaan serta unsur organisasi sosial masyarakat. Dalam akfitasnya, POKJA REDD+ didukung oleh YKAN, mereka terlibat secara aktif untuk menggali dan mengkaji peluang pengembangan program percontohan REDD+. Beberapa temuan utama yang diperoleh adalah bahwa luas tutupan hutan di Berau masih cukup tinggi, namun tentu saja memiliki ancaman deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi.

Untuk memastikan koordinasi pengembangan program REDD+ pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menjamin partisipasi dan kolaborasi multi pihak dapat berjalan dengan baik, kelompok REDD+ Berau mendorong pembentukan *joint working group* yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala Kabupaten di Berau. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masukan dan pemikiran bersama para pihak serta sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan secara penuh dalam proses penyusunan rancangan program. Forum ini melaksanakan pertemuan yang pertama pada bulan Juni 2009, nah pada pertemuan ini Program Hutan Karbon Berau (PKHB) sebagai program percontohan REDD+ berskala Kabupaten di Berau dideklarasikan di Hotel Bumi Segah Berau. Sejak saat itu penyebutan istilah PKHB mulai digunakan. Kemudian diresmikan pada tahun 2011. Pada 6 Januari 2010, Menteri Kehutanan Indonesia, Zulkifli Hasan, menandatangani pernyataan peluncuran REDD+ pertaman di Indonesia yang merupakan kegiatan ujicoba metodologi dan kebijakn dan menjadi bagian dari strategi kesiapan pelaksanaan penerapan secara penuh REDD+ pasca 2011.

Empat kegiatan REDD+ diluncurkan pertama kali oleh Kementrian Kehutanan, yaitu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dan Pemerintah Jerman. Pengembangan REDD+ merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah keputusan COP-13 di Bali, di mana negara berkembang dan negara maju didorong untuk saling bekerjasama dalam upaya pengurangan emisi dan deforestasi hutan di negara berkembang, termasuk didalamnya dukungan finansial, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju. Salah satu bentuk kerjasama yang diluncurkan oleh menteri kehutanan dan pemerintah Jerman adalah FORCLIME, yang mana program FORCLIME sampai saat ini masih dilaksanakan di Berau, integrasi FORCLIME dalam program REDD+ menjadi bentuk nyata dukungan pada aspek pendanaan dan pengelolaan program. Dengan banyaknya dukungan serta pelaksanaan program yang nyata adalah salah satu alasan program REDD+ di Berau dapat dikatakan berhasil.

2. Program REDD+ di Kampung Long Ayap

a. Kampung Long Ayap: *Emhui Lasngan Blom*

Kampung Long Ayap merupakan salah satu kampung yang berada di hulu Kabupaten Berau, kampung ini berada di sekitar Hulu Sungai Segah. Wilayah Kampung Long Ayap membentang dan memanjang dari arah selatan ke arah utara. Luas daratan Kampung Long Ayap 38.184 Ha, yang di dalamnya terdapat hutan lindung dengan luas 13.605 Ha. Kampung ini lahir melalui beberapa proses berpindah-pindah seperti ciri khas yang melekat oleh orang Dayak Punan. Tempat yang ditinggali sekarang adalah tempat mereka sudah memiliki peradaban dan modernisasi serta akses sungai maupun akses darat. Beberapa sumber mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu awalnya bertempat di Hulu Long Okeng atau di Segah. Selanjutnya, dengan melalui proses perpindahan yang panjang kemudian pindah di Gutol Nlung.

Nama Kampung Long Ayap di ambil dari nama salah satu sungai yang ada di hulu sungai, dimana mereka juga pernah menempati tempat tersebut. Nama tempat yang mereka tempati sekarang adalah kampung Jo'jakang, tetapi karena secara administrasi nama Kampung Long Ayap itu sudah tercatat di pemerintahan pada waktu itu, maka nama Long Ayap sampai sekarang digunakan. Kampung Long Ayap berada dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan kategori curah hujan tinggi dan merata di sepanjang tahun. Dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi membuat Kampung Long Ayap memiliki suhu udara relatif tinggi yang juga diikuti dengan kelembaban udara tinggi.

Berada di antara tutupan hutan yang masih lebat adalah salah satu alasan kampung ini banyak menjadi sasaran program untuk REDD+. Dengan tutupan hutan yang luas dan didorong oleh kesadaran pentingnya menjaga keberlanjutan hutan membuat masyarakat membangun visi kolektif. *Emhui Tna=Emhui Lasngan Blom* adalah visi kolektif yang dibuat dalam bahasa Dayak Mapnan, yang artinya “menjaga hutan sama dengan menjaga nafas kehidupan”.

b. YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)

YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) merupakan salah satu NGO nasional yang hadir di Kabupaten Berau sejak tahun 2015. YKAN merupakan NGO yang paling banyak mempunyai program jangka panjang di Berau. Memiliki misi melindungi wilayah

daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, YKAN akan mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif Program SIGAP merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Berau terhadap REDD+ (Sigap, 2019). Program ini bertujuan memfasilitasi pemerintah dan masyarakat kampung di seluruh Kabupaten Berau dalam rangka memperkuat dan mempercepat proses pembangunan sumber daya manusia masyarakat kampung se-Kabupaten Berau.

Program SIGAP dilaksanakan oleh YKAN berfokus pada tata kelola pemerintahan kampung, tata kelola sumber daya alam kampung, dan pengembangan ekonomi kampung. Walaupun begitu fasilitasi SIGAP di lapangan tidak hanya sebatas bidang tersebut, namun juga memfasilitasi berbagai program kegiatan yang diperlukan dan tentu saja memberikan manfaat untuk masyarakat kampung. Salah satu kegiatan dari program YKAN adalah mengajak masyarakat Kampung Long Ayap untuk menjadikan hutan sebagai perhutanan sosial. Untuk menjaga kelestarian hutan daripada hal-hal yang akan merusak keperawanan beserta ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kampung.

“...Kami merasakan bahwa kami belum mengalami perubahan kehidupan sebagaimana yang diharapkan, meskipun wilayah kampung kami sangat luas, potensi yang ada di dalam hutan sungai melimpah, dan jumlah penduduk kami sedikit, dengan potensi yang luar biasa itu. Sejak program SIGAP masuk, kami bersyukur karena mendapatkan banyak pengetahuan serta pendampingan untuk menata masa depan Kampung Long Ayap ini...” (Informan Jimy, 2023)

Berangkat dari kegelisahan yang mendalam terhadap kondisi kampungnya, Pak Jimy mulai mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk membicarakan kondisi itu dan mulai mencetuskan gagasan bagaimana jalan keluarnya. Berbekal pemahaman yang baik mengenai wilayah dan potensi yang berada di kampung, mereka mulai mengidentifikasi potensi yang mereka miliki serta menggambarkan harapan mereka terhadap kehidupan kampung di masa mendatang.

c. FORCLIME (Forest And Climate Change Programme)

FORCLIME adalah salah satu NGO nasional yang ada di Indonesia, salah satunya mereka melaksanakan program REDD+ di Kabupaten Berau. FORCLIME datang ke Berau pada tahun 2010, dengan visi dan misi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa di Indonesia. Untuk mencapai sasaran ini, FORCLIME mendukung pemerintah merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari. Salah satu program dari FORCLIME adalah pembagian bibit ikan serta bimbingan teknis cara membudidayakannya.

Program ini dilaksanakan sejak 2020, Sebelum melaksanakan program mereka melakukan FGD bersama masyarakat Kampung, mereka memaparkan program apa yang mereka bawa. Selain itu, mereka juga melakukan pendampingan kepada Masyarakat Kampung dan langsung membagikan bibit ikan beserta bahan kepada masyarakat yang berminat dengan program ini. Sesudah dilakukannya FGD dan pemaparan program kepada masyarakat, selang seminggu kemudian dilakukanlah pertemuan dengan mendatangkan narasumber yang paham mengenai budidaya ikan dengan metode kolam terpal. Dengan adanya program dari FORCLIME tersebut sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan gizi masyarakat kampung. Hal ini dapat dilihat dengan

gaya konsumsi masyarakat lebih cenderung tinggi mengonsumsi makanan instan seperti mie instan, ikan kaleng (sarden). Dengan adanya program dari FORCLIME ini masyarakat lebih sadar akan kesehatan mereka.



Gambar 1. Budidaya kolam ikan dengan metode terpal
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

d. SRP Payo-payo

Payo-payo adalah salah satu NGO nasional yang hadir di Berau atas dasar keadilan yang selalu menjadi masalah serius bagi masyarakat, khususnya warga pedesaan. Kerentanan masyarakat pada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerapuhan dalam ketahanan serta kedaulatan pangan, padahal mereka adalah penghasil dan pemasok utama bahan pangan. Namun, pembangunan yang berjalan di sektor lain tidak selalu seiring dengan pembanungan yang berada di desa. Di Berau sendiri, payo-payo melaksanakan program yang bersangkutan dengan REDD+.

Pada tahun 2015 masyarakat Kampung Long Ayap kedatangan salah satu program yang mereka tunggu-tunggu, yang mana program ini melatih mereka cara menanam serta merawat tanaman. Masyarakat sangat antusias dengan program yang satu ini. Program ini dilaksanakan dengan merangkul masyarakat untuk melaksanakannya, yang mana masyarakat kampung menjadi pengurus program. Masing-masing anggota pengurus mempunyai tugasnya tersendiri. Setelah melakukan proses penyemaian hingga bibit sudah siap ditanam, masyarakat dipersilahkan mengambil bibit kopi dengan tidak ada batasan jumlah maksimal.

Selain ditanam di ladang dan di sekitar rumah warga, kopi juga ditanam di hutan kampung di area APL. Kopi ditanam disekitar sekat pepohonan yang ada di hutan, istilahnya merapatkan shaf pohon agar terlihat makin sempurna. Tujuan ditanamnya kopi adalah untuk menambah tanaman yang bisa dimanfaatkan masyarakat. selain itu, ini adalah salah satu simbol perlawanan masyarakat Kampung Long Ayap terhadap perusahaan sawit yang berada di sekitar kampung.



Gambar 2. Wilayah APL yang ditanami kopi
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

3. Program REDD+ di Kampung Teluk semanting

a. Kampung Teluk Semanting: Pelestari Mangrove

Kampung Teluk Semanting adalah salah satu kampung yang berada di hilir Kabupaten Berau. Berada di pesisir membuat kampung ini terkenal dengan hutan mangrove dan hasil laut yang melimpah. Awal mula berdirinya Kampung Teluk Semanting dimulai dari adanya Suku Bugis yang merantau ke tanah Berau; diantaranya Uwa Rani, Uwa Penne, Uwa Kanju dan lainnya, yang berlayar dari Sulawesi untuk mencari lahan yang akan dijadikan tempat untuk berladang. Rombongan ini diperkirakan datang di tahun 1930-an, kondisi tanah yang subur memotivasi mereka untuk menetap di Teluk Semanting.

Menjelang satu tahun berjalan, rombongan tersebut dianggap berhasil dan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka selama menetap di Kampung Teluk Semanting. Keberadaan rombongan dari Sulawesi ini diketahui oleh masyarakat Teluk Pangkul, sehingga beberapa diantara mereka dikirim untuk bercocok tanam ke Teluk Semanting. Setelah satu tahun lamanya, masyarakat Teluk Pangkal yang dikirim ke Teluk Semanting juga mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan.

Mendengar berita kesuksesan ini, para pemangku kepentingan di Teluk Pangkul mengirim semua masyarakatnya untuk pindah bermukim di Teluk Semanting yang saat itu masih bernama Dusun. Pada tahun 1930-an hingga tahun 1987, Kampung Teluk Semanting belum memiliki sistem pemerintahan secara definitif. Hal ini karena adanya

beberapa kali perpindahan perkampungan yang menyebabkan kehidupan mereka masih berkelompok dan hanya dinaungi oleh seorang pemangku adat. Pola kehidupan mereka sangat taat kepada kepala adat yang mengedepankan dunia keislaman.

Seiring berkembangnya zaman pada tahun 1987-1991, kehidupan masyarakat Kampung Teluk Semanting mengalami kemajuan, dengan masuknya pipanisasi air bersih, dibangunnya lapangan sepak bola, adanya Sekolah Dasar dan yang lebih penting mulai ditunjuknya seorang Kepala Kampung (Pembakal). Sebelum dikenal sebagai kampung pelestari mangrove, masyarakat Kampung Teluk Semanting mempunyai hutan mangrove yang luas, membuat kampung ini dilirik oleh berbagai program REDD+ yang masuk dan berjalan.

b. Program SIGAP

Sama halnya dengan Kampung Long Ayap, di Kampung Teluk Semanting juga dilaksanakan program SIGAP. Program SIGAP di Kampung Teluk Semanting selain fokus pada pemerintahan kampung, juga fokus terhadap keberlanjutan hutan mangrove. Selain melakukan kegiatan penyemaian bibit, YKAN juga melakukan monitoring terhadap mangrove yang sudah ditanam. Mereka juga sering melaksanakan kegiatan pertemuan bersama masyarakat kampung membahas tentang mangrove beserta ekosistem lainnya. Setiap 3 bulan sekali, YKAN melakukan pengukuran emisii karbon di hutan mangrove, hal ini dilakukan tentu saja untuk melihat perkembangan mangrove terhadap karbon yang diserapnya. Dengan dilakukannya pengukuran karbon ini kampung akan mendapatkan dan insentif Pengukuran karbon dilakukan pada saat air laut pasang. Biasanya YKAN dan masyarakat melaksankannya pada dini hari. Cara melakukan pengukuran karbon ini dengan meletakan alat seukuran dinamo kipas angin diletakkan di dalam gabus yang ditahan oleh beberapa tiang besi, kemudian setiap 30 menit sekali mereka melihat dan mengecek jumlah karbon yang diserap. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Selain dibidang ekosistem mangrove, YKAN melaksanakan program dibidang ekonomi masyarakat kampung dengan mendirikan UMKM, yaitu pengolahan hasil laut yaitu pembuatan kerupuk ikan, UMKM ini dijlankan oleh kelompok ibu-ibu di kampung UMKM yang dibentuk oleh YKAN, bertujuan agar membantu kegiatan ekonomi masyarakat kampung. Selain melakukan pembentukkan UMKM, mereka juga membantu dalam hal pemasaran. Produk olahan ibu-ibu ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di Berau. Mempunyai rasa gurih dan legitnya rasa ikan membuat kerupuk ikan ini mempunyai ciri khas tersendiri.

c. FORCLIME (Forest And Climate Change Programme)

FORCLIME adalah salah satu NGO nasional yang ada di Indonesia, salah satunya mereka melaksanakan program REDD+ di Kabupaten Berau. FORCLIME datang ke Berau pada tahun 2010, dengan visi dan misi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa di Indonesia. Untuk mencapai sasaran ini, FORCLIME mendukung pemerintah merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan serta ekosistem yang lestari.

Mempunyai wilayah yang berada di pesisir membuat Kampung Teluk Semanting menjadi salah satu Kampung yang mempunyai hutan mangrove yang luas. Tetapi masih ada beberapa lahan kosong yang berada di pesisir, membuat para NGO melakukan

program penanaman mangrove. Jenis mangrove yang ditanam adalah *rhizophora* sp sebanyak 7.500 bibit, penanaman ini dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu, FORCLIME juga melakukan penyebaran bibit kepiting bakau. Hal ini bertujuan sebagai upaya pelestarian ekosistem mangrove. Sejak dilakukan penanaman bibit mangrove dan penyebaran bibit kepiting bakau pada tahun 2021, masyarakat Kampung mulai merasakan dampaknya. Selain penanaman mangrove dan penyebaran bibit kepiting, FORCLIME juga melakukan salah satu program penangkaran madu kelulut.

Penangkaran ini dilakukan disekitaran hutan mangrove, yaitu di sepanjang tracking hutan mangrove. Berada di hutan mangrove membuat penangkaran ini terlihat lebih natural. Madu kelulut ini dipanen setiap 3 bulan sekali, selain dijual madu kelulut ini dimanfaatkan oleh masyarakat kampung sebagai obat tradisonal. Yang uniknnya jika masyarakat memerlukan maka dipersliahkan mengambil dengan gratis. Jika beruntung para wisatawan bisa ikut memanen madu kelulut. Hal inilah yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke eko-wisata mangrove.



Gambar 3. Tempat penangkaran madu kelulut di sepanjang tracking mangrove
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2023)

d. Perisai Alam Borneo

Perisai Alam Borneo adalah NGO lokal yang berada di Berau. Didirikan pada tahun 2018 di Tanjung Redeb Berau. Berdirinya perisai atas dasar prakarsa bersama para aktivis gerakan *civil society* dan pemuda desa di Kabupaten Berau serta akademisi yang memiliki visi keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Perisai hadir sebagai NGO yang konsen dalam mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Banyak ketidakadilan dalam pengelololaan sumber daya alam diyakini sebagai akar masalah ketimpangan sosial maupun degradasi lingkungan.

Pembentukan TPM merupakan salah satu hal yang luar biasa. Pembentukan TPM ini di dampingi oleh NGO Perisai Alam Borneo. dengan adanya TPM menjadikan hutan mangrove lebih terorganisir. Pembentukan TPM adalah hasil pertemuan antara ide dan gagasan konservasi yang dibawah oleh pendampingan NGO dan praksara masyarakat Kampung Teluk Semanting Pendampingan yang dilakukan sampai pada tahap program perlindungan mangrove yang membutuhkan adanya kelompok masyarakat. Sedangkan

inisiatif dan praksara masyarakat cukup kuat dengan kesadaran akan fungsi mangrove yang berfungsi menahan laju abrasi pemukiman yang sebagian berada di wilayah bibir pantai dan dilindungi oleh mangrove.

Hal ini semakin komprehensif dengan diketahuinya keanekaragaman hayati di kawasan mangrove Kampung Teluk Semanting, maka hal tersebut akan menjadi tantangan dan harapan masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan aset kampung. Hutan mangrove yang multifungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama menunjang perekonomian warga akhirnya menjadi suatu keharusan untuk keberlanjutan kehidupan dilingkungan pesisir pantai. Program-program pengelolaan mangrove terpadu sangat diperlukan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan pesisir dan memeprtahankan habitat flora dan fauna di kawasan hutan mangrove dan tentu saja menjadikannya sebagai kawasan penunjang perekonomian masyarakat kampung. Dengan dibentuknya TPM, menambah pengetahuan baru yang mulai muncul dari masyarakat terutama betapa pentingnya mangrove. Hal ini membuat masyarakat semakin peduli dengan mangrove serta satwa yang berada dalam areal hutan mangrove Kampung Teluk Semanting.

“...Setelah dibentuk TPM, dan kami banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sampai kami pun dipercaya bang. Jika ada program atau kegiatan yang bersangkutan dengan Mangrove, TPM menjadi garda terdepan. Selain itu para pemuda di Kampung pun menjadi lebih aktif dengan dibentuknya TPM ini...” (Informan Bang Rijal, 2023)

Dengan dibentuknya TPM, menambah pengetahuan baru yang mulai muncul dari masyarakat terutama betapa pentingnya mangrove. Hal ini membuat masyarakat semakin peduli dengan mangrove serta satwa yang berada dalam areal hutan mangrove Kampung Teluk Semanting.

4. Analisis Pendekatan Gerakan Lingkungan Hidup dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal

Implementasi program REDD+ di Kabupaten Berau menjadikan masyarakat sebagai utama. Pendekatan seperti ini merupakan bentuk pendekatan partisipatif, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam suatu program ([Ichsan, 2018](#)). NGO pelaksana program REDD+ selalu memperhatikan tiga hal, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Ditinjau dari paradigma gerakan lingkungan hidup, pelaksanaan program REDD+ di Kabupaten Berau menekankan tiga faktor yang menjadi perhatian utama gerakan eko-populisme ([Weitmer & Birner, 2005](#); [Safitri & Hamid, 2023](#)).

Masyarakat di lokasi pelaksanaan program REDD+ memiliki pemahaman tentang lingkungannya dan mampu untuk menjaga sumber daya alam serta mengelolanya secara berkelanjutan. Masyarakat memiliki kearifan lokal yang dijalankan secara turun-temurun. Eko-populis memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dengan menekankan bahwa di dalamnya terdapat sumber penghidupan masyarakat lokal ([Hamid & Meilinda, 2023](#)). Dengan adanya program REDD+, dan melibatkan Masyarakat didalam pelaksanaan program, serta memperhatikan aspek lingkungan dan pengetahuan lokal masyarakat, dapat dikatakan para NGO yang berada di Kabupaten Berau menerapkan pendekatan dengan gerakan lingkungan hidup secara eko-populis.

Dengan hadirnya berbagai program untuk masyarakat kampung membuat mereka semakin percaya diri dengan kemampuannya. Salah satunya adalah bagi aparat kampung

mereka mulai terbiasa dengan sistem untuk penginputan data. Selain itu masyarakat kampung sampai saat ini dapat menikmati bibit yang mereka tanam dulu. Pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan membuat mereka melakukan patroli hutan setiap minggu, untuk memastikan hutan mereka terjaga dari kejahatan Ekologis.

D. KESIMPULAN

Gerakan lingkungan hidup yang diterapkan pada pelaksanaan program REDD+ oleh NGO di Kabupaten Berau menggunakan pendekatan eko-populisme. Aspek-aspek pengetahuan lokal dan sumber kehidupan masyarakat lokal menjadi perhatian utama. Pendekatan ini ditopang dengan pendekatan partisipatif yang diterapkan pada proses merumuskan gagasan-gagasan program hingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan karaktersitik dan aspirasi masyarakat lokal. Hadirnya program REDD+ tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi, sosial politik hingga sosial budaya masyarakat lokal. Sebaliknya, program-program yang dilaksanakan mampu diintegrasikan dengan cara-cara hidup masyarakat secara turun temurun, serta pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Bahkan dengan adanya program REDD+, masyarakat mendapatkan sumber kehidupan tambahan yang berkelanjutan, dan menstimulus masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Program REDD+ di Kabupaten Berau sebaiknya terus dilaksanakan dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama dan berpegang pada kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Pengalaman praktek di Kabupaten Berau penting untuk direplikasi di berbagai tempat pelaksanaan program REDD+.

REFERENSI

- Asrawawija, E. (2020). Gerakan Ekopoulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen Di Pegunungan Kendeng. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 35-47. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/13891>
- Bayrak, M. M., & Marafa, L. M. (2016). Ten Years of REDD+: A Critical Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities. *Sustainability*, 8(7), 1-22. <https://doi.org/10.3390/su8070620>
- Febriyanti, S. (2017). *Perlawanan Masyarakat Adat Talang Mamak Terhadap Program Restorasi Ekosistem PT ABT (Studi Kasus Perebutan Akses dan Legitimasi Properti dalam Pelaksanaan Program REDD+ di Hutan Ranti)* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/116778
- Ferry, R. (2013). *Yang Tersingkir dan Yang Eksklusif Orang Dodolo, REDD+ dan Aktivisme Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/71071
- Firnaherera, V. A. (2013). *Konflik Pengelolaan REDD+ (Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah)* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/63520>
- Hamid, I., & Amalia, A. (2024). *Ragam Pemikiran Ekologis: Menyemai Asa, Membumikan Kehidupan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Komojoyo Press.
- Hamid, I., & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Livelihood Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 1-23. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.13585>

- Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 155-173. <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6384>
- Ichsan, A. C. (2018). Kajian Kerentanan Masyarakat Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Lombok Barat dengan Menggunakan Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Belantara*, 1(2), 67–76. <https://doi.org/10.29303/jbl.v1i2.21>
- Kholida, W. (2016). Dampak dari Implementasi Kegiatan Percontohan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) terhadap Kelompok Masyarakat Adat dan Lokal ditinjau dari Aspek Keamanan Manusia) [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/119156>
- KLHK. (2019). Potret Implementasi REDD+ Di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <http://pojokiklim.menlhk.go.id>. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/potret-implementasi-redd-di-indonesia>
- Marti, S. (2015). *Kepemimpinan Akar Rumput dan Pendidikan Populer di Indonesia*. Bogor: The Samdhana Institute and Life Mosaic.
- Miles, B., Huberman, M., & Johnny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3 ed.). Los Angeles: Sage Publication.
- Ningsih, P. C. H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83-93. <http://garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1157073&val=5396&>
- Petras, J., & Veltmeyer, H. (2007). Social movements and the state: Political power dynamics in Latin America. In *Imperialism, Neoliberalism and Social Struggles in Latin America* (hal. 235–259). Leiden: BRILL.
- Safitri, M., & Hamid, I. (2023). Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Dalam Konflik Agraria. *PADARANGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(2), 106-116. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i02.8437>
- Sigap, P. (2019). *Program Pejuang Sigap Sejahtera Kabupaten Berau 2019*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Y. Sofia (ed.); 3 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, T. (2019). Program Initiatives Developed In Redd + Implementation Efforts In East Kalimantan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.2.145-160>
- Weitmer, H., & Birner, R. (2005). & Birner, R. (2005). *Between Conservationism, Eco-Populism and Developmentalism: Discourses in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*. (37; CAPRI Working Paper). <https://ideas.repec.org/p/fpr/worpps/37.html>
- Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2013). Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(2), 189-20044. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.189-200>